

NASKAH PUBLIKASI

**KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM SKEMA
SISTER CITY ANTARA KOTA BANDUNG DAN
KOTA BRAUNSCHWEIG JERMAN (2000 – 2016)**



Disusun Oleh:

Ardi Luthfi Kautsar

20141060033

**MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Dengan ini kami mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta:

Nama : Ardi Luthfi kautsar

NIM : 20140160033

Jenjang Program Studi : S2 Magister Ilmu Hubungan Internasional

SETUJU jika naskah publikasi (Jurnal Ilmiah) yang disusun oleh yang bersangkutan setelah mendapat arahan daei pembimbing, dipublikasikan untuk kepentingan akademis.

Yogyakarta, 26 Mei 2017

Ardi Luthfi Kautsar

KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM SKEMA SISTER CITY ANTARA KOTA BANDUNG DAN KOTA BRAUNSCHWEIG JERMAN (2000 – 2016)

Disusun Oleh

Ardi Luthfi Kautsar

Emali: luthfie48@gmail.com

Abstract

Bandung is the largest city in West Java and the third largest city by population in Indonesia after Jakarta and Surabaya. It is located about 140 km from the state capital of Indonesia, Jakarta. With the conditions of the population and the strategic place, the city of Bandung has a lot of potentials to be developed. One way that is done by Bandung to develop it's potentials is by establishing a sister city partnership where in this case the city of Bandung chooses Braunschweig as a partner in the sister city partnership. The writer will try to examine the background of renewed agreement between the cities in 2000. In this study, the writer will use the complex interdependence theory as a tool to understand why Bandung chooses Braunschweig city as the partner in the sister city partnership. The writer uses methods of library research where the data are secondary source. All data are taken from books, journals, articles on the internet, and other data relevant to the research.

Keywords: *Bandung, Braunschweig, Sister City, Paradiplomacy.*

Pendahuluan

Bandung adalah kota terbesar yang ada di Jawa Barat dan merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Jika dilihat dari jumlah penduduk, Bandung merupakan kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya. Dimata dunia, kota Bandung sangat terkenal dengan tempat diadakannya konferensi Asia Afrika yang pertama pada tahun 1955.

Bandung sendiri diambil dari kata “Bendung” dalam Filosofi Sunda, Kata “Bendung” berasal dari kalimat “Nga-Bendung-an Banda Indung” kalimat ini merupakan kalimat yang sangat sakral dan luhur, karena kalimat ini mengandung nilai ajaran Sunda. “Nga-Bendung-an” berarti bersaksi, memperhatikan, menyaksikan, “Banda” berarti Benda atau segala sesuatu yang ada di bumi ini, dalam kalimat ini bumi diartikan Sebagai “Indung”.¹

Kota Bandung sebenarnya merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Bandung pada tahun 1810 oleh Bupati R. A. Wiranatakusumah II setelah berpindahnya pusat kota dari

¹ Kota Bandung, tersedia dari (artikata.com/arti-14767-bandung.html) diakses pada 19 September 2016, 19.00 WIB.

Krapyak ke tepi selatan Jalan Pos. Alasan pemindahan ini adalah karena Krapyak tidak strategis sebagai ibu kota, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.²

Dari sektor pendidikan, Bandung juga menjadi salah satu tujuan pendidikan, hal ini dikarenakan banyaknya sarana-sarana pendidikan seperti universitas yang mana memiliki kredibilitas yang tidak diragukan, bahkan Bandung juga termasuk salah satu Kota Pelajar setelah Yogyakarta. Hal tersebutlah yang melatar belakangi kerjasama-kerjasama internasional yang dilakukan oleh Bandung, salah satunya adalah kerjasama *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Braunschweig yang memang cikal bakalnya berasal dari kerjasama pendidikan, kerjasama yang dilakukan antara Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Indonesia dengan (*Padagogishe*) di Kota Braunschweig Jerman, yang mana kerjasama ini dipelopori dan atas rekomendasi Prof. Dr. George Eckert. Maka lambat laun terbentuklah kerjasama *sister city* seperti sekarang ini.

Di mata Indonesia sendiri, Kota Bandung adalah Kota yang pertama yang menjalin kerjasama luar negeri oleh pemerintah lokal. Hal ini disebabkan oleh adanya kerjasama internasional yang dilakukan oleh Kota Bandung dengan Kota Braunschweig pada tahun 1960. Kerjasama ini pada awalnya merupakan kerjasama atas rekomendasi Prof. Dr. George Eckert yang pada waktu itu menjabat sebagai salah satu staff di UNESCO, hal ini berpijak bahwa di kedua kota ini terdapat perguruan tinggi keguruan (*Padagogishe*) di Braunschweig dan di Bandung terdapat perguruan tinggi pendidikan guru (PTPG) yang sekarang menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Kerjasama universitas ini, menghasilkan banyak dampak positif, seperti saling membantu memperbanyak literasi buku-buku yang dijadikan untuk melengkapi perpustakaan di masing-masing universitas. Pengembangan potensi dengan mengadakan penelitian bersama dan sebagainya. jadi awal terbantuknya hubungan kerjasama kedua kota ini merupakan hubungan kerjasama antar universitas.

Sampai pada tanggal 24 Juni 1959, pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Atase Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Marjoenani, mengemukakan keinginan untuk meresmikan persahabatan antar kedua kota (Bandung-Braunschweig) tersebut. Kemudian pada tanggal 24 Mei 1960 di museum Kota Braunschweig dilaksanakan upacara khusus mengenai

² Sejarah Kota Bandung, tersedia dari (<http://bandung.go.id/rwd/index.php?fa=pemerintah.detail&id=326>) diakses pada 19 September 2016, 19.00 WIB.

peresmian persahabatan kedua kota tersebut, yang mana pada waktu itu Indonesia diwakili oleh Duta Besar Republik Indonesia Dr. Zairin Zain, dan dari pihak Jerman diwakili oleh Hans Gunther Weber (Walikota Braunschweig). Di Bandung sendiri piagam persahabatan ini di tandatangani langsung oleh Walikota Bandung, Bapak R. Priatnakusumah.³

Ikatan persahabatan yang telah berjalan kurang lebih selama 40 tahun telah menghasilkan banyak kemajuan. Hasil positif ini bisa dirasakan oleh warga kedua kota kembar ini, selain menjadi kota dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, Bandung juga memiliki keunggulan dalam bidang pariwisata, industry kuliner, dan *fashion*. Tetapi dalam perjalanannya, kerjasama *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Braunschweig tidaklah berjalan Mulus. Ada beberapa faktor penyebab atau hambatan dalam kerjasama *sister city* ini.

Krisis utang yang melanda eropa telah merubah wajah perekonomian negara-negara anggotanya, krisis ini memang pada perkembangannya melanda hampir seluruh Negara Eropa termasuk Jerman. Hal ini yang kemudian menyebabkan kemunduran terhadap kerjasama *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Braunschweig. kerjasama ini pada kenyataannya sering mengalami kondisi yang stagnan atau jalan di tempat atau bisa dibilang vakum, dalam artian setiap program yang akan dijalankan selalu sebatas peninjauan, tidak pernah menghasilkan suatu perjanjian atau MoU yang baru.

Masalah lainya juga timbul di Kota Bandung itu sendiri seperti adanya tumpang tindih atau berbelit-belitnya birokrasi di Kota Bandung, seperti, ketika Kota Bandung kedatangan delegasi dari Kota Braunschweig pada Februari 2017 lalu, sebetulnya pihak Braunschweig akan memberikan bantuan untuk PDAM Tirtawening Kota Bandung, namun dalam hal ini PDAM Tirtawening ternyata tidak semerta-merta dapat langsung menyetujui bantuan tersebut, harus ada izin dari instansi-instansi lainnya dan itu tidak mungkin dilakukan dengan waktu yang singkat yang akhirnya hanya sebatas peninjauan. Pandangan sebagian orang Indonesia model seperti ini sangst lumrah dilakukan, namun berbeda halnya dengan pandangan pemerintah Kota Braunschweig yang memandang bahwa hal seperti ini merupakan gambaran ketidak seriusan pemerintah Bandung atas bantuan kerjasama yang diberikan Kota Braunschweig.

Masalah lainnya adalah adanya pengurangan anggaran *sister city* di Kota Bandung. Dalam wawancara awal yang dilakukan penulis dengan Bidang Kerjasama Kota Bandung,

³ “Sister city Braunschweig”, tersedia di, <http://bandung.go.id/rwd/index.php?fa=berita.detail&id=660> diakses pada tanggal 19 September 2016, 19.00 WIB

penulis menemukan fakta bahwa adanya pengurangan anggaran kerjasama yang sangat signifikan anggaran yang sebelumnya mencapai 10 milyar di potong menjadi hanya 100 juta. Hal ini sangat berdampak terhadap kerjasama Kota Bandung dengan Kota Braunschweig Jerman. Fakta lain yang penulis temukan juga menyebutkan bahwa ternyata masyarakat Kota Bandung kurang atau sangat sedikit yang mengetahui kerjasama *sister city* ini.

Kurangnya sosialisasi mungkin menjadi faktor yang paling di soroti dalam kerjasama Bandung-Braunschweig ini, bagaimana tidak, kerjasama *sister city* yang pertama dan terlama di Indonesia ini ternyata masih banyak yang belum mengetahuinya, masyarakat Kota Bandung khususnya, masih sangat sedikit yang mengetahui kerjasama ini. Dibandingkan dengan *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu, Fort worth mungkin bisa dibilang kedua kota tersebut lebih dikenal oleh masyarakat Kota Bandung dibanding *sister city* Kota Bandung dengan Kota Braunschweig.

Masalah yang lain yang terjadi di Kota Bandung adalah adanya *political will* yang berbeda-beda setiap walikota, dalam wawancara penulis dengan salahsatu narasumber di Kota Bandung menyebutkan bahwa keinginan politik yang berbeda-beda yang membuat setiap kerjasama *sister city* di kota Bandung menjadi tidak kondusif, ketika pergantian kepemimpinan, maka berganti pula program kerja meraka, hal ini bisa dilihat ketika ada beberapa kunjungan dari Braunschweig ke Bandung, yang menyambut bukanlah dari pimpinan teras walikota, seperti Walikota atau wakilnya, padahal menurut narasumber sebelumnya telah ada pemberitahuan dan kesepakatan bahwa yang akan menyambut adalah walikota, hal ini yang kemudian menimbulkan asumsi bahwa memang pada walikota saat ini Braunschweig bukanlah prioritas utama dalam kerjasama *sister city* di Kota Bandung.

Tidak adanya landasan kerjasama yang baru dan yang lebih menarik juga menjadi salah satu faktor penyebab seringnya kerjasama ini mengalami stagnansi, dalam wawancaranya Deutch Club bersama Elke Gerlach pengurus bagian kerjasama International Kota Braunschweig menyebutkan bahwa memang dahulu banyak sekali kerjasama yang dilakukan baik itu pertukaran pemuda maupun kedinasan, pada awalnya pertukaran dinas dilakukan selama satu tahun namun kemudian dikurangi menjadi 3 (tiga) bulan dan menjadi satu bulan. Begitu juga dengan pertukaran pemuda, pernah juga berjalan beberapa kali namun akhirnya terhenti, hal ini disebabkan oleh karena kurangnya ketertarikan pemuda dari pihak Braunschweig, hal ini karena kurangnya promosi dari Kota Bandung sendiri,

“banyak warga Braunschweig yang memiliki ketertarikan terhadap indoneisa dan mereka menginginkan adanya kerjasama dengan Indonesia, namun untuk

Bandung pemuda kami masih sedikit yang mengetahui, jadi yang terpenting dalam suatu kerjasama adalah harus adanya kertertarikan awal terhadap suatu negara, agar hal ini lebih menarik untuk direalisasikan”.

Sehingga dari pemaparan diatas penulis melihat ada hal yang harus dilakukan, dimana penulis melihat adanya ketidak sehatan dalam kerjasama sister city antara Kota Bandung dengan Kota Braunschweig yang banyak masalah oleh karena itu terbentuklah sebuah rumusan masalah.

Dari hasil pemaparan di atas, penulis melihat adanya ketidak sehatan didalam hubungan kerjasama antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig, maka dari itu timbulah sebuah pertanyaan, Mengapa Kota Bandung melanjutkan kerjasama *sister city* dengan Kota Braunschweig, walaupun banyak hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya?, Dalam menyelesaikan masalah di atas, penulis menggunakan konsep Paradiplomasi dan Model Pengambilan Keputusan Graham T Allison.

Pada pembahasan dalam penelitian ini, tentunya penulis menggunakan satu teori dan satu konsep untuk membantu menjelaskan fenomena yang ada dalam memecahkan permasalahan. Sehingga teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah: konsep paradiplomasi dan teori model pengambilan keputusan. Berikut penjelasan teori dan konsep tersebut.

1. Konsep Paradiplomasi

Diplomasi memiliki arti yang sangat luas dan mencakup beberapa kegiatan. Menurut Dictionary.com, diplomasi dapat diartikan sebagai suatu Keahlian, atau keterampilan dan kehati-hatian yang mana semua ini perlu dimiliki oleh setiap pelaku diplomasi untuk menangani masalah-masalah yang terjadi di luar negeri.⁴

Menurut Takdir Ali Mukti dalam bukunya Paradiplomasi Kerjasama Internasional oleh Pemda di Indonesia menyebutkan bahwa paradiplomasi adalah desentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administratif dalam proses yang terjadi pada sub nasional, atau lembaga-lembaga politik, atau kebijakan publik, dalam otoritas yang berbeda di bawah kendali pemerintah pusat⁵ namun hal ini berbeda dengan

⁴ Arti kata Diplomasi, tersedia di (<http://dictionary.reference.com/browse/diplomacy>) diakses pada 20 November 2016, 07 .00 WIB.

⁵ Mukti, Takdir Ali, '*Paradiplomasi Kerjasama internasional oleh Pemda di Indonesia*'. The Phinisi Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, p. 15.

kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh negara. Paradiplomasi tidak berusaha untuk mewakili kepentingan nasional yang lebih umum dan luas, terlebih untuk menunjukkan masalah yang lebih spesifik dengan tanpa melanggar aturan tentang negara yang berdaulat tetapi kerjasama ini untuk membebaskan pemerintah daerah untuk menentukan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Namun masih dibawah kendali pemerintah pusat dan mengikuti system internasional yang berlaku. Hal ini lah yang kemudian disebut pradiplomasi.

John Revenhill dalam bukunya *Paradiplomacy in Action, the Foreign Relations of Sub National Governments* Paradiplomacy menjelaskan bahwa paradiplomasi adalah alat untuk memahami hubungan luar negeri yang dilakukan langsung oleh pemerintah daerah (sub nasional) yang memiliki tujuan tertentu dalam berbagai bidang atau di khususkan untuk meningkatkan kesejahteraan daerahnya namun masih dalam pengawasan pemerinah pusat dalam rangka menghadapi globalisasi.⁶

Steffan Wolf dalam Jurnal yang dikeluarkan oleh *Bologna Center of International Affair*. Mengungkapkan bahwa paradiplomasi mengacu pada Kebijakan Luar negeri yang dilakukan oleh sub negara di kancah internasional yang bertujuan untuk mengejar kepentingan mereka sendiri bukan untuk kepentingan nasional.⁷

Menurut Ivo Duchacek dalam Bukunya "*Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in International Relations*" yang dikutip dari Hans Michael Mann "*federalism and International Relations The Role of Sub-national Units, Hans Michelmann paradiplomacy sister city Bandung and Braunschweig*" is:

Global Paradiplomacy is Diplomacy that performed by sub-national governments in a country with sub-national governments in other countries, either both nationally and second sub region countries not bordering.

⁶ Ed. Keating, Francisco Aldecoa and Michael. '*Paradiplomacy in Action*'. New York: Frank Cass and Co. Ltd., 2013.

⁷ Journal of International Affairs, Bologna Center, accessed on 15 Desember 2016 05.00 WIB available from: (<http://bcjournal.org/volume-10/paradiplomacy.html>)

Sementara itu Panayotis Soldatos di sebuah penjelasan kerangka Studi Negara Federal sebagai actor kebijakan luar negeri: Peran Unit *sub-national*, Hans Michalemann, menjelaskan Faktor-faktor paradiplomasi ini meliputi⁸:

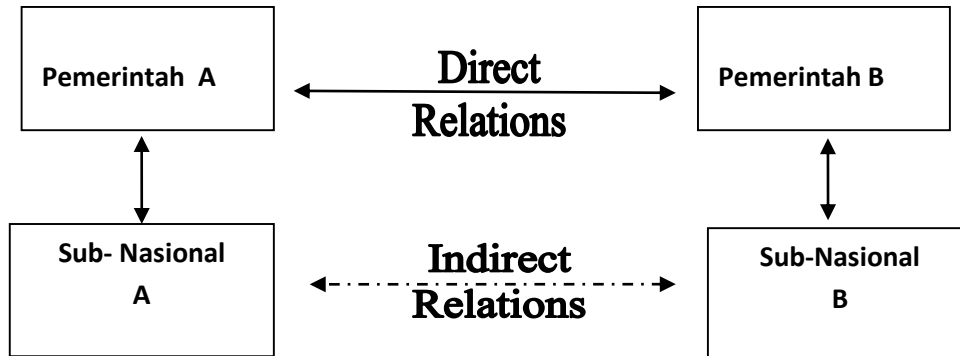
1. Usaha kedua belah pihak untuk mencapai tujuan berdasarkan perbedaan geografi, budaya, agama, bahasa, politik, dan faktor-faktor lain yang berbeda dengan daerah lain di negara mana sub aktor itu berada. Serta pada dasarnya bahwa meskipun persepsi ini terkait dengan segmentasi objek tetapi lebih di dorong oleh faktor politik juga.
2. Adanya ketidakseimbangan dan representatif unit sub nasional dan unit nasional di hubungan internasional.
3. Perkembangan ekonomi dan kelembagaan secara alami di unit sub nasional dari pemerintah daerah mampu mendorong untuk mengembangkan perannya.
4. Kegiatan diplomasi bisa termotivasi oleh fenomena internasional yang dapat dengan mudah ditafsirkan untuk mengikuti peringkat pada hal-hal yang membuat sub unit nasional lainnya.
5. Adanya kesenjangan dalam perumusan kebijakan luar negeri dan inefisiensi dalam pelaksanaan hubungan luar negeri di pemerintah pusat.
6. Masalah yang terkait dengan pembangunan bangsa dan konstitusional juga dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan paradiplomasi.
7. Domestikasi kebijakan luar negeri sebagai akibat dari isu-isu politik yang diusulkan telah memotivasi pemerintah daerah untuk memiliki kemampuan melakukan paradiplomasi.

Paradiplomasi dapat dikatakan kerjasama langsung antar daerah di negara dengan wilayah di negara-negara lain, tidak langsung di sini berarti dalam hal pelaku, disebut

⁸ Soldatos, Panayotis, "An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-policy Actors: dalam Hans J. Michelman dan Panayotis Soldatos (ed), 'Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units', Clarendon Press, Oxford, 1990, dikutip dari buku, Paradiplomasi, Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia, Takdir Ali Mukti, The Pinisi Press, Yogyakarta, 2013

tidak langsung karena aktor yang melakukan hubungan ini adalah sub nasional (pemerintah daerah), bukan Pemerintah Pusat, sebagai hasil dalam skema berikut:

Skema Hubungan Paradiplomasi⁹



2. Teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)

Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berfikir dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan. Keputusan itu sendiri merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang dihadapi dengan tegas. Pengambilan keputusan adalah pengambilan kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih, karena jika hanya ada satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang diambil.

Menurut Suhernan, pengambilan keputusan adalah proses memilih dan atau menentukan berbagai kemungkinan diantaranya situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih¹⁰. Senada dengan Suherman, Graham T Allison dalam bukunya “*Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*”, mengajukan tiga model pengambilan keputusan, yaitu Model Aktor Rasional, Model Proses Organisasi, dan Model Politik Birokratik, berikut ini uraiannya:

1. Model Aktor Rasional

Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan akan melewati tahapan penentuan tujuan, alternatif/opsi, konsekuensi dan pilihan keputusan. Model ini menyatakan bahwa keputusan yang dibuat merupakan suatu pilihan rasional yang telah didasarkan pada pertimbangan rasional/intelektual dan

⁹Sidik Jatmika, , *Otonomi Daerah: ‘Perspektif Hubungan Internasional (seri kajian Otonomi Daerah)’*. Yogyakarta, BIGRAF. 2001.

¹⁰ Suhernan. *Psikologi Kognitif*. Srikandi, 2005.

kalkulasi untung rugi sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang matang, tepat, dan prudent. Analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang di ambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaah kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu.

Dalam model ini para pembuat keputusan itu dianggap rasional dan kita umumnya memang cenderung berpikir bahwa keputusan secara rasional, kelemahannya asumsi ini mengabaikan fakta bahwa para pembuat keputusan itu adalah manusia yang bisa membuat kesalahan dan yang selalu menghadapi berbagai kendala eksternal dari birokratnya sendiri, dari berbagai kelompok kepentingan, opini publik dan sebagainya. Terutama dalam sistem demokrasi. Allison sadar kelemahan itu sehingga beliau mengajukan model lainnya, yaitu model “proses organisasi” dan “politik birokratik”.

2. Model Proses Organisasi

Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses mekanistik yang melewati tahapan, prosedur dan mekanisme organisasi dengan prosedur kerja baku yang telah berlaku selama ini. Keputusan yang ditetapkan dipandang sebagai output organisasi yang telah mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan skala prioritas organisasi. Dalam model ini menggambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja suatu organisasi besar yang berfungsi menurut suatu pola perilaku. Pembuatan keputusan bukan semata-mata proses intelektual, lebih merupakan proses mekanik, keputusan merujuk kepada keputusan-keputusan yang telah dibuat dimasa lalu, prosedur rutin yang berlaku, atau pada peran yang ditetapkan bagi unit birokrasi itu (*standard operating procedure*).

Organisasi ini pada dasarnya bersifat konservatif dan jarang yang mau mencoba sesuatu yang baru, umumnya cukup senang dengan perubahan-perubahan kecil. Salah satu cara untuk mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian masalah adalah dengan melakukan tindakan seperti sebelumnya, organisasi cenderung memiliki pedoman, buku petunjuk yang berisi bagaimana caranya organisasi

mengatasi masalah, apa yang akan terjadi pada suatu waktu bisa diramalkan dengan melihat apa yang telah terjadi sebelumnya.

3. Model Politik Birokratik

Dalam model ini PLN (Politik Luar Negeri) dipandang bukan sebagai hasil dari proses intelektual yang menghubungkan tujuan dan sarana secara rasional. PLN adalah hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan di antara berbagai aktor dan organisasi, *bargaining game* antar bangsa, dengan kata lain pembuatan keputusan PLN adalah proses sosial, bukan intelektual. Jadi dalam Model III ini digambarkan suatu proses dimana masing-masing pemain berusaha bertindak secara rasional, setiap aktor negara berusaha menetapkan tujuannya, menilai berbagai alternatif sarana dan menetapkan pilihan secara intelektual, tidak ada pemain yang bisa memperoleh apa yang diinginkan dalam *bargaining* ini (bisa dianalogikan permainan catur).

Karena dalam Model III ini menekankan *bargaining games* sebagai penentu PLN, maka dalam mempelajarinya kita harus memperoleh informasi tentang persepsi, motivasi, posisi, kekuasaan dan *manuver* dari pemain-pemain yang terlibat didalamnya. Jadi kita harus tahu (a) *Siapa yang ikut bermain? atau kepentingan atau perilaku siapa yang punya pengaruh terhadap keputusan.* (b) *Apa yang menentukan sikap masing-masing pemain itu.* (c) *Bagaimana sikap-sikap para pemain itu diaggresikan sehingga menghasilkan keputusan?.*

Tabel 1.2
Outline Model Pembuatan Keputusan Graham T. Allison

	Model		
	Aktor Rasional	Proses Organisasi	Politik Birokratik
Paradigma	<ul style="list-style-type: none"> • Didasari oleh tujuan dan sasaran (fungsi Tujuan) • Tersedia Alternatif • Konsekuensi dari tiap alternative • Memilih alternative yang dianggap paling baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi yang memutuskan • Tujuan sasaran keputusan • Prosedur Oprasi Standar (SOP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Para pemain dalam posisi masing masing • Tujuan, kepentingan, taruhan, masing masing actor • Kekuasaan • Saluran aksi
Dasar Unit analisis keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi pemerintah sebagai pilihan terbaik 	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi pemerintah sebagai output organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi pemerintah sebagai resultan dari proses politik
Konsep yang mengatur	<ul style="list-style-type: none"> • Actor rasional • Permasalahan • Aksi sebagai pilihan rasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Actor-aktor organisasi sebagai konstelasi pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Para pemain dalam posisi masing-masing • Prioritas dan persepsi yang sempit

	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan dan sasaran • Pilihan-pilihan • Konsekuensi • Alternative yang dipilih 	<ul style="list-style-type: none"> • Unsur permasalahan dan pemilihan kekuasaan prioritas dan persepsi yang sempit • Aksi sebagai output organisasi • Koordinasi dan pengendalian terpusat • Keputusan dari pimpinan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan dan kepentingan • Taruhan dan tempat berdiri • Kekuasaan • Saluran aksi • Aturan pemain • Aksi sebagai repolitik
Pola kesimpulan dominan	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi pemerintah yang dipilih sesuai dengan sasaran/tujuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi pemerintah dalam jangka pendek merupakan output yang lebih luas, ditentukan oleh POS dan Program-Program 	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi pemerintah merupakan resultan dari tawar menawar
Proporsi Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Efek Substansi • Dipilih sesuai dengan peningkatan atau penurunan cost. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diimplementasikan oleh organisasi. • Pilihan-pilihan organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resultan politik, aksi dan Hubungan hubungan.

Sumber: <https://pusdiklatbkt.wordpress.com/2013/01/18/analisis-konflik-dan-resolusi-konflik-di->

Kota Bandung memiliki alasan mendasar dan mengakar dalam perjalanannya mempertahankan kerjasama *sister city* dengan Braunschweig, alasan ini yang diyakini menjadi dasar pijakan mengapa Bandung mempertahankan *sister city* ini. Perjalanan yang penuh dengan *historis* dimana Bandung-Braunschweig merupakan Kota pertama di Indonesia yang melakukan kerjasama internasional dengan skema *sister city*.

Penelitian ini merupakan studi tentang kemitraan *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig. Penelitian ini adalah untuk meninjau latar belakang kerjasama mengapa Kota Braunschweig terpilih sebagai mitra *sister city*, serta untuk mengetahui manfaat yang dapat diperoleh kedua Kota dari kerjasama ini, kerjasama antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig adalah program *sister city* tertua pertama dan yang berhasil diterapkan di Indonesia.

Lahirnya Kerjasama *Sister City* ini tidak lepas dari pengaruh globalisasi yang telah berkembang pesat hampir di seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini dipengaruhi pula oleh kesadaran setiap Negara bahwa dewasa ini jika hanya mengandalkan potensi dalam negeri mereka tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya secara keseluruhan. Tetapi hal itu bisa diatasi dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Hal ini menurut Sidik Jatmika merupakan sebuah bentuk transisi politik dari sistem politik non-demokratis menjadi sebuah sistem politik yang demokratis, yang artinya adapula pergeseran model diplomasi, dimana dari yang awalnya berbentuk tradisional diplomasi menjadi sebuah diplomasi yang modern sebagai pengembangan dari diplomasi itu maka lahir pula aktor-aktor internasional baru di kancah hubungan internasional. Tidak hanya negara yang menjadi aktor utama untuk membangun

sebuah kerjasama yang *cross borderis* atau *international relation*, tapi kini pemerintah daerah pun bisa untuk membuat suatu hubungan lintas negara. Sehingga pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam kerjasama luar negeri.

Menurut Profil Bandung dalam “Bandung Dalam Angka” Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dalam jumlah penduduk termasuk ketiga (3) terbesar setelah Jakarta dan Surabaya dan sebagai kota dengan angka pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia. Di dunia internasional, Bandung juga menjadi ikon kota sebagai kota tempat terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955, yang didalamnya menyerukan semangat anti-kolonialisme.¹¹

Di Indonesia sendiri, Kota Bandung adalah Kota Pertama yang mempraktekkan konsep paradiplomasi, yaitu sebuah kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.¹² Hal ini didasari oleh adanya kerjasama internasional yang dilakukan oleh Kota Bandung dengan Kota Braunschweig. Kerjasama yang pada awalnya atas dasar Prof. Dr. George Eckert, yang pada saat itu menjabat sebagai salah satu staf UNESCO, kerjasama ini didasari oleh adanya perguruan tinggi keguruan di masing-masing kota tersebut diantaranya PTPG (Perguruan Tinggi Pendidikan Guru) di Kota Bandung yang kini berganti nama menjadi UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) dan Padagogische di kota Braunschweig Jerman.

Kolaborasi kerjasama antara Universitas ini menuai hasil yang positif, seperti saling membantu dalam hal literatur buku untuk mengisi perpustakaan di universitas masing-masing, pertukaran informasi para ahli dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya terbentuknya kerjasama *sister city* ini pada awalnya atas dasar kerjasama Universitas. Untuk Kota Bandung sendiri kerjasama ini ada awalnya adalah upaya untuk mengembangkan potensi-potensi yang telah ada di Kota Bandung, karena memang Bandung menyadari untuk mengembangkan potensi ini perlu adanya suatu pengembangan jaringan kerjasama, salah satu bentuk jaringan kerjasama yang di kembangkan oleh Kota Bandung adalah dengan skema *sister city*. Pada awalnya potensi yang di kembangkan hanya terbatas pada bidang pendidikan, namun kemudian MoU kerjasama ini diperbaharui pada tahun 2000 oleh walikota yang pada saat itu A.A Tarmana sebagai walikota di perluas ke beberapa bidang yang lain diantaranya yaitu pariwisata, ekonomi dan perdagangan, serta pertukaran pemuda.

¹¹ Bandung, Badan Pusat Statistik Kota, “Kota Bandung Dalam Angka 2003-2012”, p.6.

¹² Takdir Ali Mukti, ‘Paradiplomacy, Kerjasama luar negeri oleh pemda di Indonesia, p. 2.

Analisa tingkat yang digunakan dalam penelitian ini ialah tingkat analisa Kelompok Individu. Tingkat analisa kelompok individu menekankan bahwa individu pada umumnya melakukan tindakan internasional dalam kelompok. Setiap perilaku yang ada didalam tatanan hubungan internasional merupakan wujud hubungan antar kelompok kecil di berbagai negara. Kelompok masyarakat ini terdiri dari kabinet-kabinet, dewan penasehat keamanan, badan-badan pemerintahan, organisasi, birokrasi, departemen pemerintahan, dan lain-lain. Hubungan internasional juga dapat difahami dari sikap kelompok masyarakat yang terlibat dalam hubungan internasional.

Kajian mengenai *sister city* menekankan keterlibatan kelompok masyarakat di suatu daerah yang melakukan hubungan luar negeri, yang dalam penelitian ini mengambil fokus kepada kelompok masyarakat Kota Bandung yang diwakilkan oleh Pemerintah Daerah dalam memproses kepentingan-kepentingan dalam segala sektor bagi Kota Bandung, dalam kerjasama dengan satu kelompok masyarakat di kota Braunschweig (Jerman).

Pendekatan yang dipakai dalam kajian ini adalah menggunakan teori paradiplomasi, teori ini pertama kali dikenalkan oleh Ivo Duchacek yang menurut beliau teori ini adalah, sebuah kerjasama internasional yang dilakukan oleh sub nasional di satu negara, dengan sub nasional di Negara lain.¹³ Sehingga sangat cocok apabila dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Bandung, dalam hal ini Bandung merupakan sub-nasional aktor, dimana posisi Bandung disini sebagai daerah, bukan sebagai negara yang melakukan kerjasama dengan Kota Braunschweig yang dalam kasus ini Braunschweig sebagai sub-nasional aktor juga. Disamping itu jika kita kaitkan dengan apa yang dikatakan Duchacek (1990)¹⁴, yang mana menurut beliau bahwa paradiplomasi terbagi menjadi 3 (tiga) tipe, diantaranya tipe yang 1 (pertama) Transborder Paradiplomasi, yaitu paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub nasional di suatu negara dengan pemerintah sub nasional di negara lain, namun sub nasional berbatasan secara langsung.¹⁵

Tipe yang ke 2 (dua) adalah transregional paradiplomasi, yaitu paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub nasional di suatu negara dengan pemerintah sub nasional di

¹³ Takdir Ali Mukti, "*Paradiplomacy, Kerjasama luar negeri oleh pemda di Indonesia*", p. 2.

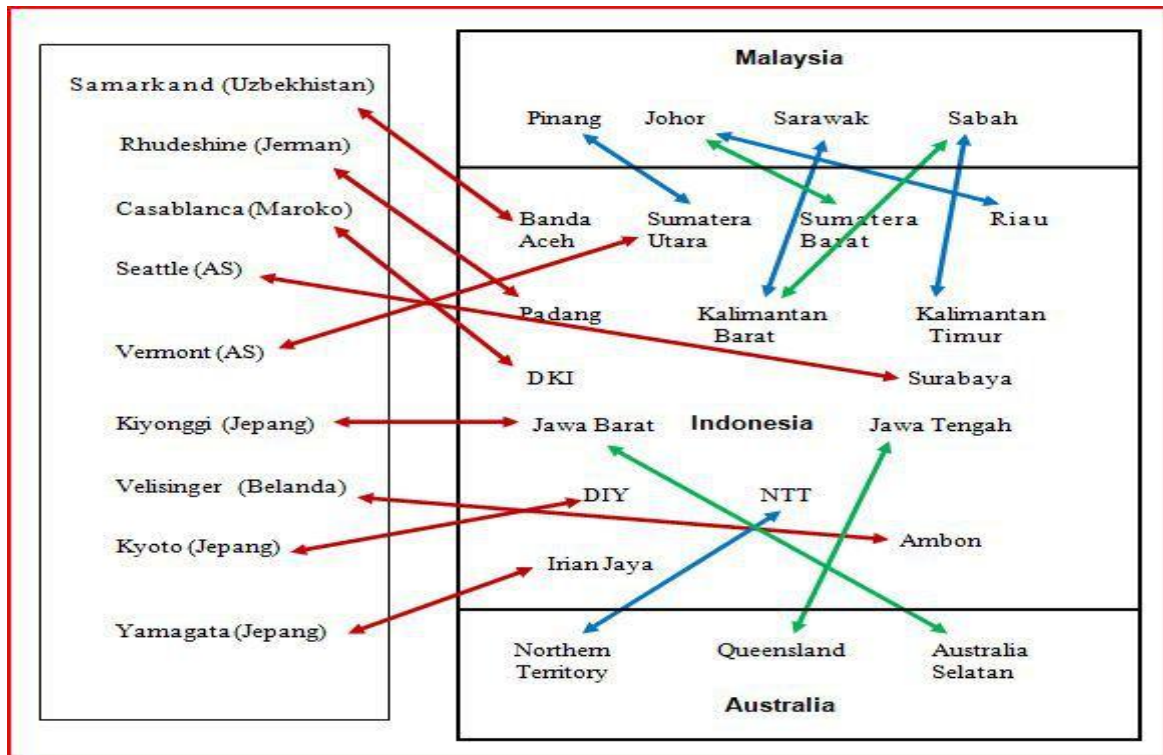
¹⁴ Duchacek, Ivo D, "*Perforated Sovereignities: Towards a Typology of New Actors in International Relations*" dalam Hans J. Michelman dan Panayotis Soldatos (ed.), *Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units*, Clarendon Press, Oxford, 1990. P. 24.

¹⁵ *ibid*

negara lain, kedua wilayah sub nasional tersebut tidak berbatasan tetapi dua wilayah negara dimana unit-unit sub nasional tersebut berada berbatasan secara langsung.

Tipe yang ke 3 (tiga) adalah *global paradiplomacy*, yaitu Paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub nasional di suatu negara dengan pemerintah sub-nasional di negara lain, baik kedua wilayah sub nasional maupun kedua wilayah negara tersebut tidak berbatasan¹⁶.

Tipe-tipe Paradiplomasi



	Transregional Paradiplomacy
	Transborder Paradiplomacy
	Global Paradiplomacy

Sumber: <http://godedeahead.wordpress.com/2009/12/16/paradiplomasi-dalam-politik-luar-negeri-indonesia/>, diakses pada 2/2/2017, 09.00 WIB.

¹⁶ ibid

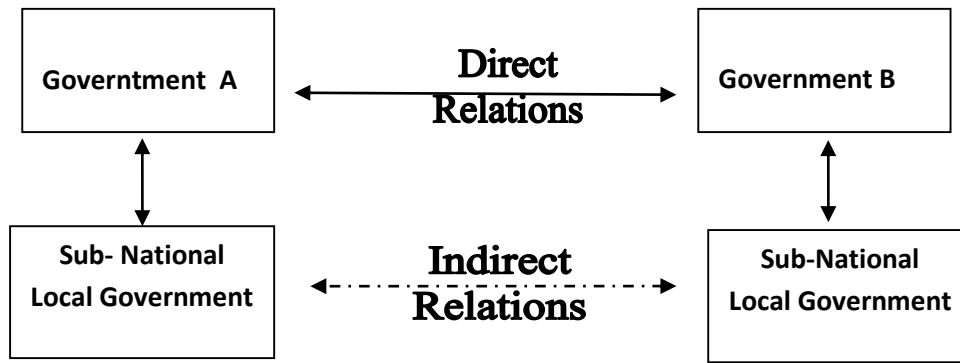
Sementara itu Panayotis Soldatos di sebuah penjelasan kerangka Studi Negara Federal sebagai Aktor Kebijakan Luar Negeri: Peran Unit *Sub National*, Hans Michalemann, menjelaskan Faktor-faktor paradiplomasi ini meliputi¹⁷:

- 1) Usaha kedua belah pihak untuk mencapai tujuan berdasarkan perbedaan Geografi, Budaya, agama, bahasa, politik, dan faktor-faktor lain yang berbeda dengan daerah lain di negara mana sub aktor itu berada. Serta pada dasarnya bahwa meskipun persepsi ini terkait dengan segmentasi objek tetapi lebih didorong oleh faktor politik juga.
- 2) Adanya ketidakseimbangan dan representatif unit sub nasional dan unit nasional di hubungan internasional.
- 3) Perkembangan ekonomi dan kelembagaan secara alami di unit sub nasional dari pemerintah daerah mampu mendorong untuk mengembangkan perannya.
- 4) Kegiatan diplomasi bisa termotivasi oleh fenomena internasional yang dapat dengan mudah ditafsirkan untuk mengikuti peringkat pada hal-hal yang membuat sub-unit nasional lainnya.
- 5) Adanya kesenjangan dalam perumusan kebijakan luar negeri dan inefisiensi dalam pelaksanaan hubungan luar negeri di pemerintah pusat.
- 6) Masalah yang terkait dengan pembangunan bangsa dan konstitusional juga dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan Paradiplomasi.
- 7) Domestikasi kebijakan luar negeri sebagai akibat dari isu-isu politik yang diusulkan telah memotivasi pemerintah daerah untuk memiliki kemampuan melakukan paradiplomasi.

Paradiplomasi dapat dikatakan kerjasama langsung antar daerah di negara dengan wilayah di negara-negara lain, tidak langsung di sini berarti pelaku, disebut tidak langsung karena aktor yang melakukan hubungan ini adalah sub nasional (pemerintah daerah), bukan pemerintah pusat, sebagai hasil dalam skema berikut:

¹⁷ Soldatos, Panayotis, "An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-policy Actors: dalam dalam Hans J. Michelman dan Panayotis Soldatos (ed), 'Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units', Clarendon Press, Oxford, 1990

Skema Paradiplomasi¹⁸



Karakteristik kota yang sama, dapat membantu mempermudah dibentuknya program-program pembangunan sub-sub sektor unggulan, karena fungsinya juga untuk meningkatkan potensi-potensi kota yang telah ada sebelumnya, bukan untuk menutupi atau melengkapi kekurangan kota. Kesamaan karakteristik pula yang mewadahi disusunnya poin-poin yang dikerjasamakan dalam MoU antara Kota Bandung dan kota Braunschweig pada tahun 2000. MoU tersebut merupakan bukti bahwa kerjasama antar kedua kota dilakukan semakin spesifik lagi.

1. Kesamaan karakteristik yang memotivasi kedua kota bekerjasama tersebut terbagi atas beberapa sub sektor, yaitu:

a) Kedua kota merupakan sebagai pusat pariwisata

Seperti yang kita ketahui bahwa Kota Bandung merupakan kota wisata bagi kota-kota disekelilingnya, bahkan ini terbukti ketika di akhir pekan, dimana populasi yang masuk kota bandung meningkat, hal ini karena banyak warga dari luar Bandung, seperti dari Jakarta dan sekitarnya yang datang untuk berwisata ke kota bandung, wisata-wisata yang ada di Kota Bandung antara lain adalah: wisata Belanja, wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata pendidikan, wisata budaya, dan wisata lainnya.

Begitu juga dengan Kota Braunschweig sendiri, kota ini juga terkenal dengan kota wisata, yang paling terkenal adalah wisata sejarah, dimana kita akan diajak berkeliling mengunjungi bangunan-bangunan peninggalan abad 19.

Hal inilah yang kemudian menjadi modal kedua kota untuk saling membangun sistem kota wisata bersama-sama.

¹⁸ Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah: 'Perspektif Hubungan Internasional (seri kajian Otonomi Daerah)'*. Yogyakarta, BIGRAF. 2001.

b) Kedua kota sebagai pusat kebudayaan

Sangat jelas jika Bandung disebut sebagai pusat kebudayaan, dengan adanya 7 Program prioritas seni dan budaya di Bandung, yang diselenggarakan oleh Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung pada tahun 2008 ini jelas membuktikan bahwa Bandung merupakan pusat budaya.¹⁹

Selain itu banyak pula seniman seniman yang lahir dari tanah Pasundan ini, Akngklung ujo salah satunya yang merupakan menjadi *icon* Kebudayaan di Kota Bandung ini, dalam pemerintahan sekarang, Kota Bandung juga sangat mengedepankan nilai nilai budaya, hal ini tercermin dari adanya program dari Pemerintah Kota Bandung yaitu ”*REBO NYUNDA*”. Program ini merupakan salah satu program Pemerintah Kota Bandung untuk melestarikan Kebudayaan sunda yang dipandang sudah mulai luntur, Program ini juga sebagai Implementasi dari Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemeliharaan, dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda yang menyebutkan bahwa setiap hari rabu warga kota bandung diharuskan berkomunikasi dalam bahasa sunda.

Begitu juga dengan Kota Braunschweig, yang mana didalamnya terdapat banyak Museum-museum budaya, juga setiap harinya selalu menyajikan program-program kebudayaan²⁰. Braunschweig sebagai tempat kebudayaan juga banyak menghasilkan seniman-seniman yang mendunia.

c) Kedua kota sebagai sentra pendidikan

Sejak jaman kolonial Belanda, Bandung menjadi tujuan pelajar-mahasiswa dari berbagai penjuru tanah air untuk melanjutkan pendidikannya. Saat itu yang ada hanya Technise Hoge School (THS) yang sekarang nomenklturnya Institut Teknologi Bandung (ITB), dimana ITB tetap menjadi salah satu kampus favorit di Indonesia, kemudian muncul perguruan tinggi lainnya. Cuaca Bandung yang tidak terlalu panas menjadi nilai tambah sendiri bagi kemajuan bidang pendidikan. Mahasiswa menjadi lebih nyaman melanjutkan pendidikan di kota ini.

¹⁹ Disbudpar kota Bandung, 7 Program Prioritas. Yang didalamnya terdapat salah satu program peningkatan sejarah yaitu adalah 1. Pembinaan Seni Dan Budaya dengan sasaran terwujudnya Bandung Kota Seni dan Budaya Tahun 2008.

²⁰ Official website of city of Braunschweig, *Culture*, accessed from: (<http://www.braunschweig.de/english/culture/index.html>) on 10 October 2014,

Begitu juga dengan kota Braunschweig, di kota ini terdapat perguruan tinggi yang pertama yaitu Padagogische Hochschule, yang mana hal ini menjadi alasan Kota Bandung memilih Kota Braunschweig sebagai partner yang pertama.

2. Adanya Manfaat-Manfaat yang Didapat Kota Bandung dalam Kerjasama *sister city*. Salah Satunya adalah Memudahkan Kerjasama antar Universitas yang Ada di Bandung dan Braunschweig, dan Pengembangan Kota.

a) Manfaat dalam Pengolahan Limbah

Pemaparan diatas menunjukkan kepada kita bahwa dalam hal ini, Kota Bandung memilih mempertahankan kerjasama dengan Kota Braunschweig di Kota Bandung adalah karena adanya sebuah input perjanjian kerjasama berupa MoU pada tahun 2000 yang di dalamnya tertuang beberapa poin kegiatan yang dilakukan bersama yang salah satunya adalah dalam bidang penataan kota yaitu adanya bantuan survei penataan kali Cikapundung pada tahun 2000, dimana sungai ini merupakan salah satu dari dua sungai utama yang melintasi Kota Bandung, dan sebagai sumber pengairan untuk Wilayah Kota Bandung. Pada awalnya sungai ini jauh dari bersih, dan merupakan perumahan kumuh di sepanjang sungai tersebut, berkat adanya Survei penataan tersebut kini sungai itu bisa digunakan sebagai sarana publik berupa taman dan ruang terbuka hijau. Kemudian input lainnya adalah ketika ditandatanganinya komitmen baru pada tahun 2016 tentang kesepakatan Kota Braunschweig untuk membantu Kota Bandung dalam hal *water waste management* di PDAM Tirtawening.

Seperti diketahui, pada pertemuan tersebut delegasi Braunschweig yang dipimpin oleh Wakil Walikota Braunschweig, Annegret Ihbe, didampingi oleh Konsul Jenderal RI di Hamburg, Sylvia Arifin, berkesempatan untuk melakukan *sharing best practices* pengelolaan air limbah di Bandung dan Braunschweig serta melihat langsung fasilitas pengelolaan air limbah milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandung Tirtawening di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada hari Kamis, 18 Februari 2016. Direktur Pengolahan Air Limbah, Boy Tagajagawani, ST, MT, dalam presentasi singkatnya menyampaikan bahwa PDAM Tirtawening adalah 1 dari 5 PDAM di Indonesia yang mempunyai 2 core bisnis. Yakni pengelolaan air bersih (*clean water treatment*), dan pengelolaan limbah (*waste water treatment*). Fasilitas pengolahan limbah milik PDAM Tirtawening dibangun pada tahun 1992 dengan luas mencapai 82 Ha. Fungsi utama fasilitas tersebut adalah untuk menekan tingkat pencemaran air di wilayah Kota Bandung yang berasal dari berbagai air limbah

rumahtangga, perhotelan, dan lain sebagainya.²¹ Program ini adalah untuk mendukung penerapan konsep *smart city* di kota Bandung dimana dalam hal ini adalah sebagai upaya pembentukan dari smart environment yang merupakan salah satu dari program *smart city* Kota Bandung yang sedang akan dikembangkan.

Latar belakang kenapa Braunschweig yang akhirnya dipilih, hal ini merujuk kepada Kota Braunschweig itu sendiri, dimana di kota tersebut memiliki fasilitas pengelolaan air limbah dengan luas mencapai 275 Ha dan kapasitas pengelolaan mencapai 50.000 m³/hari untuk melayani 250 ribu penduduk. Fasilitas tersebut secara umum menggunakan 3 tahapan pengelolaan, yakni : *Mechanical process, nutrient removal, dan infiltration process*. Hal yang sangat menarik dari fasilitas pengelolaan air limbah di Kota Braunschweig adalah pemanfaatan kembali seluruh air limbah yang masuk menjadi air siap pakai, baik untuk keperluan irigasi maupun untuk pelestarian air tanah. Hasil dari air limbah yang dikelola Kota Braunschweig juga disalurkan ke sungai-sungai sehingga warga Kota Braunschweig dapat langsung meminum air sungai yang mengalir di sepanjang kota tersebut.

b) Manfaat dalam hal Kerjasama Antar Universitas di Kota Bandung dan Braunschweig

Kemudian yang selanjutnya *sister city* Bandung-Braunschweig ini menjadi akses bagi universitas-universitas untuk mengadakan kerjasama pendidikan dengan Kota Braunschweig. Dan sebagai wadah komunitas Pemuda Pecinta Jerman di Bandung. Seperti diketahui, pada bulan Februari 2016, Bandung kedatangan delegasi dari Braunschweig, dalam agenda tersebut, pemerintah Braunschweig tidak hanya mengunjungi ke pihak Pemerintah, tetapi juga ada agenda pertemuan dengan pihak swasta, salah satunya Universitas Nurtanio di Kota Bandung. Dalam pertemuan ini, Universitas Nurtanio berhasil bekerjasama dengan *Hochschule Fur International Wirtschaft Und Logistic (HWL)* di Braunschweig. Dalam hal ini fokus kerjasama dititikberatkan kepada pendidikan dan kerjasama dalam bidang *scientific*.

Hal ini secara tidak langsung juga menjadi ajang promosi baik bagi Bandung ataupun Braunschweig, lebih luasnya hubungan ini berpengaruh juga terhadap semakin

²¹ “waste water management dan kepemudaan menjadi salah satu focus utama kerjasama sister city antara Bandung dan Braunschweig” tersedia di http://www.kjihamburg.de/index.php?option=com_content&view=article&id=775:waste-water-management-dan-kepemudaan-menjadi-salah-satu-fokus-utama-kerjasama-sister-city-antara-bandung-dan-braunschweig&catid=42&Itemid=407&lang=id. Diakses pada 2//2017, pukul 11.18 WIB

harmonisnya hubungan Indonesia dengan Jerman. Ada beberapa poin kerjasama diantaranya :

1. Pertukaran dari anggota fakultas dan peneliti,
2. Pertukaran mahasiswa S1 dan S2
3. Mengadakan penelitian bersama
4. Mengadakan kuliah umum dan simposium
5. Pertukaran informasi tentang literatur

Selain menjalin kerjasama dengan Universitas Nurtanion, Delegasi Braunschweig juga mengunjungi PT. Dirgantara Indonesia dan PT. Sandang Internusa. Dalam kunjungan ini, delegasi Braunschweig diterima langsung oleh Kepala Divisi Sumber Daya manusia PT. Dirgantara Indonesia. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung fasilitas yang dimiliki produsen pesawat terbang terbesar Indonesia. Kepala Divisi Sumber Daya manusia PT. Dirgantara Indonesia menyampaikan bahwa perusahaan tersebut memiliki berbagai kerjasama di bidang pengembangan teknis pesawat terbang dengan sektor dirgantara dari Braunschweig, yakni dengan *German Aerospace center* (DLR). Selain itu, beberapa ahli pesawat terbang yang saat ini berkarya di PT. Dirgantara Indonesia merupakan alumni dari *Technische universitat* (TU Braunschweig).

Terkait dengan pengembangan ke depannya, PT. Dirgantara Indonesia juga sangat terbuka atas berbagai kerjasama teknis, khususnya dalam hal pengembangan sektor *Maintenace, Repair and Overhaul* (MRO) pesawat terbang. Delegasi Braunschweig dalam kesempatan ini juga berkunjung ke PT Insan Sandang Internusa yang merupakan salah satu sentra produksi tekstil di Bandung. Direktur PT Insan Sandang Internusa menerangkan bahwa perusahaan tersebut menghasilkan produk tekstil khusus seragam, pakaian anti air, dan pakaian kerja anti api. Produk-produk PT Insan Sandang Internusa banyak di ekspor ke berbagai negara di kawasan Asia, Eropa, dan Timur Tengah.

Selain menjalin kerjasama dengan universitas dan industri, terkait dengan kegiatan kepemudaan, delegasi Braunschweig berkesempatan mengadakan pertemuan dengan kepala Bidang Kepemudaan Dispora Pemerintah Kota Bandung, serta organisasi pecinta jerman di Bandung, Bandung *Deutsch Club*. Dalam pertemuan ini Bandung-Braunschweig juga membuka kesempatan kepada Komunitas untuk bisa melakukan

kontak langsung dan kegiatan pertukaran pelajar serta pengenalan youth entrepreneurs di kedua kota. Acara pertemuan yang berlangsung di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung ini memang sangat bermanfaat, Kepala Bidang kepemudaan Dispora Kota Bandung menyampaikan bidang kepemudaan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengisi kerjasama *sister city* Bandung-Braunschweig, khususnya melalui peningkatan intensitas berbagai program *people to people contact* antara pemuda dan pelajar dari kedua kota kembar. Untuk mencapai tujuan tersebut, kepala bidang kepemudaan Dispora Kota Bandung senantiasa mendukung berbagai kegiatan kepemudaan yang melibatkan berbagai organisasi kepemudaan Kota Bandung, termasuk Bandung *Deutsch Club*.

Secara pengamatan, kunjungan delegasi Braunschweig ke Bandung adalah dalam rangka konsolidasi kerjasama *sister city* kedua kota kembar telah berlangsung cukup baik dan informatif, terutama terkait kerjasama yang dapat ditindaklanjuti menjadi berbagai program konkrit sesuai dengan perkembangan kedua kota kembar. Adanya kerjasama konkrit program magang mahasiswa jurusan Teknik Penerbangan, baik itu antara Universitas Nurtanion Bandung maupun Institut Teknologi Bandung tentunya dapat membantu percepatan pertumbuhan sektor industri MRO nasional yang masih sangat minim, Khususnya dari sisi ketersediaan SDM yang berkualitas.

Dengan demikian jelas Kota Bandung mempertahankan kerjasama dengan Braunschweig yang menurut teori pengambilan keputusan adalah termasuk kedalam kategori rasional aktor, dimana dalam hal ini Bandung melihat Braunschweig sebagai aktor yang sudah berpengalaman dalam pengembangan atau penataan limbah air yang dapat digunakan di seluruh kotanya, dan Bandung memandang bahwa pertukaran pemuda ke Jerman adalah benar untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia di Kota Bandung, hal ini sangat jelas memberi manfaat kepada Kota Bandung.

A. Analisis

Dalam melakukan penulisan tesis ini penulis memberikan perbandingan tulisan ini dengan tulisan lain yang berkaitan tentang kerjasama internasional dalam bentuk *sister city*, terutama yang membahas tentang kerjasama antara Kota Bandung dengan Kota Braunschweig. Selain itu penulis juga mencoba me-*review* beberapa buku yang berkaitan dengan kerjasama model ini, memang sangat sedikit penelitian atau penulisan yang secara khusus membahas

tentang kerjasama antara Kota Bandung dan Braunschweig, namun beberapa sumber dirasa cukup bagi penulis untuk digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Adapun studi pustaka yang digunakan dalam menjawab mengapa Bandung mempertahankan kerjasama *sister city* dengan Braunschweig antar lain, Stivani Ismawira Sinambela (2014) dalam tesisnya di S2 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan tema *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional (Studi Kasus: Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Medan dengan Penang)*. Kajian ini lebih memfokuskan pada pengambilan kebijakan oleh pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan kerjasama internasional dalam skema kerjasama *sister city* dan tidak membahas tentang peran kerjasama *sister city* antara kota Bandung dan Braunschweig. Tulisan ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan Publik tentang peran dari kerjasama *sister city*, khususnya dalam kerjasama *sister city* antara Kota Bandung dan Braunschweig.

Sidik Jatmika, dalam buku berjudul *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, mengatakan bahwa gelombang demokratisasi berhembus seperti angin yang bergerak menyebar ke penjuru dunia menebarkan gelombang perubahan dalam bentuk transisi politik dari sistem politik non demokratis berubah ke sistem politik demokratis. Dalam politik demokratis penulis melihat adanya pergeseran model diplomasi, dari tradisional diplomasi, menjadi diplomasi yang lebih modern yang mana hal ini memudahkan bagi pemda untuk mengelola langsung kebijakan daerahnya dalam ranah dunia internasional.

Didukung dengan adanya kebijakan desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang kemudian menghasilkan otonomi daerah. Dimana kemudian otonomi daerah ini membawa peluang yang sangat besar bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan dunia internasional untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan kawasan. Jatmika mengatakan salah satu konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah seluas-luasnya adalah keinginan agar daerah diberi keleluasaan untuk melakukan hubungan internasional.²² Tetapi meskipun dibebaskan dalam mengelola kerjasama internasional, namun dalam perakteknya ada pengawasan dan pertimbangan dari DPRD seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 42 yang menyebutkan tentang tugas dan wewenang DPRD untuk mengawasi, memberikan pendapat dan pertimbangan serta menyetujui rencana kerjasama internasional yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Penelitian dari Joseph Nye Jr dkk., yang meneliti dampak kerjasama *sister city* ini. Ketika Peer Schouten mengajukan pertanyaan kepada Joseph Nye Jr. tentang, 'dalam dunia

²² Sidik Jatmika, 2001, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

internasional seperti apa kita hidup saat ini?'. Nye menyatakan bahwa dewasa ini kita hidup di jaman hibrid. Sebagian dari dunia kita yang positif-normative, serta berbasis pada 'kedaulatan negara' adalah 'doktrin' Westphalian, sedangkan di bagian lain adalah model post-Westphalia, yang di dalamnya aktor-aktor transnasional dan norma-norma hukum humaniter internasional menerabas melintasi batas-batas kedaulatan negara. Kedua bagian ini tampaknya masih akan terjadi untuk beberapa dekade ke depan, sehingga analisis positive dan normative yang baik akan mencakup keduanya.²³

Perjanjian Westphalia atau *The Peace of Westphalia* atau *The Westphalia Treaty*, tahun 1648, German, yang mengakhiri Perang Eropa selama 30 tahun, berhasil memancarkan tonggak sejarah bernegara secara modern dalam konsep '*nation-state*', dan menjadi permulaan bagi terjadinya sistem hubungan internasional secara modern, yang disebut sebagai '*Westphalian System*'.²⁴ Doktrin Westphalian hasil dari perjanjian ini meliputi prinsip penghormatan atas kedaulatan suatu negara dan hak untuk menentukan nasib sendiri suatu bangsa, kemudian prinsip kesamaan di depan hukum bagi setiap negara, dan prinsip non-intervensi atas urusan internal negara lain. Sebagaimana dikatakan oleh Watson bahwa Perjanjian Westphalia melegitimasi persemakmuran negara-negara berdaulat, yang menandai kemenangan negara dalam mengendalikan masalah-masalah internalnya, dan menjaga kemerdekaannya secara eksternal. Perjanjian ini banyak melahirkan aturan dan prinsip politik bagi negara-negara baru.²⁵ Fakta *historis* tentang prinsip bernegara secara modern dalam '*The Westphalia Treaty*' ini bagi para pen-studi ilmu hubungan internasional, terutama kalangan teoritis realist-tradisional, dianggap merupakan titik awal terjadinya studi ilmu hubungan internasional modern.

Gugatan terhadap pendekatan para realist-tradisionalis tidak terbendung lagi seiring dengan semakin menyatunya sistem ekonomi dunia yang ditunjang dengan penyatuan sistem teknologi

²³ [Peer Schouten](#), Theory Talks is an initiative Beberapa wawancara Theory Talks telah diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul "Theory Talks, Perbincangan Pakar Sedunia Tentang Teori Hubungan Internasional Abad Ke-21", Editor: Bambang Wahyu Nugroho dan Hanafi Rais, PPSK dan LP3M UMY, Yogyakarta, 2012

²⁴ Osiander, Andreas, '*Sovereignty, International Relations and Westphalian Myth*', International Organization 55, hal. 251, The IO Foundation and Massachusetts Institute of Technology, USA, Spring 2001

²⁵ [Watson](#), sebagaimana dikutip oleh Robert Jackson dan Georg Sorenson dalam, '*Introduction to International Relations*', Oxford University Press Inc., New York, 1999. Dalam edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Dadan Suryadipura, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2009

informasi dalam jaringan yang bersifat *'world wide'*. Demikian pula dengan perilaku masyarakat internasional yang semakin fleksibel, baik secara institusional maupun individual, untuk melakukan interaksi yang bersifat transnasional, dimana aktor-aktor pemerintahan lokal pun secara langsung ikut berinteraksi dengan pihak asing dalam kapasitasnya selaku *'sub-state actors'*, atau apa yang lebih dikenal sebagai *'paradiplomacy'*. Pertanyaannya adalah, bagaimana gambaran riil konstruksi hubungan antarbangsa saat ini, dan bagaimana aktor-aktor lokal dalam merespon interaksi transnasional itu?

Takdir Ali Mukti, dalam Buku *Paradiplomacy, kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, mengatakan bahwa hubungan internasional yang mewarnai system interaksi masyarakat dunia pasca regim Westphalia memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada tingkat Negara maupun lokal, individu maupun kelompok. Hubungan transnasional tidak serta merta menghapuskan sendi utama kedaulatan suatu negara, namun melahirkan sebuah tuntunan untuk pengaturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk melakukan pembagian kedaulatan dalam batas konstitusinya.²⁶

Selain dari buku tersebut penulis juga me-review penelitian yang telah ada, antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Jojo Juhaeni dengan judul penelitian “Perbandingan Tata Kelola Pemerintahan Antar kota Lintas Negara (*sister city*) di Pemerintahan kota Bandung”. Jojo membahas lebih banyak tentang tata kelola *sister city* Kota Bandung dengan berbagai kota kembarnya. Dalam akhir pembahasan, Jojo menjelaskan apa saja tentang kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah menyebutkan bahwa dalam kerjasama dengan model seperti ini masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap masyarakat, baik dari segi program kerjasama, manfaat, dan pelaksanaannya bagi warga Kota Bandung. Sehingga hanya sedikit warga yang mengetahuinya, bahkan peneliti mengatakan bahwa sebagian besar warga Kota Bandung tidak mengetahui adanya program kerjasama Kota Bandung dengan kota di luar negeri maupun dalam negeri.

Dalam hal ini, penulis dengan peneliti memiliki persamaan perspektif tentang kerjasama ini. Namun ada juga perbedaannya. Untuk lebih mudah dipahami, penulis menyederhanakan beberapa aspek dari para peneliti diatas.

Table 4.1
Studi Pustaka

<i>Review/Aspek</i>	<i>Tempat</i>	<i>Waktu</i>	<i>Fokus Kajian</i>
---------------------	---------------	--------------	---------------------

²⁶ Takdir Ali Mukti, 2013, *Paradiplomacy: kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, Yogyakarta.

	Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung atau tepatnya di Bidang Kerjasama Balai Kota Bandung	Waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 dengan jangkauan penelitian dari tahun 2010	Kajian ini akan difokuskan kepada alasan-alasan Kota Bandung dalam mempertahankan kerjasama <i>sister city</i> dengan Kota Braunschweig
Jojo Juhaeni	Penelitian yang dilakukan Jojo ini bertempat di bagian umum kota Bandung	Penelitian ini dilakukan dalam kunjungan ilmiah pada tahun 2009	Kajian ini difokuskan pada perbandingan pelaksanaan tata kelola <i>sister city</i> kota Bandung
Stivani Ismawira Sinambela	Penelitian dalam tesis Stivani ini mengambil tempat di Kota Medan dan Komisariss Jendral Malayasia di Medan	Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 dengan jangkauan penelitian dari tahun 2010	Kajian ini lebih difokuskan kepada proses pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam kerjasama Internasional, dan lebih kepada kerjasama antara Kota Medan dan Pulau Penang.
Ika Ariani Kartini	Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung	Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswi S2 di Universitas Gajah Mada pada tahun 2012	Kajian ini lebih memfokuskan pada penerapan publik governance di pemerintah kota Bandung namun tidak membahas banyak tentang kerjasama Bandung dengan Braunschweig.
Sidik Jatmika	Buku ini disusun di Yogyakarta dan mengambil studi kasus antara lain Jawa Timur dan Australia Barat, dan Bukit Tinggi dan Seremban	Buku ini diterbitkan pada tahun 2001	Fokus kajian dalam buku otonomi daerah ini adalah pembahasan no 22 tahun 1999 dan lebih difokuskan pada bagaimana penempatan daerah sebagai aktor baru dalam interaksi kerjasama internasional, ada beberapa studi kasus dalam buku ini, antara lain Bukit Tinggi-Seremban, dan Provinsi Jawa timur dan Australia Barat.
Takdir Ali Mukti	Penulisan buku ini bertempat di Yogyakarta dengan memfokuskan studi kasus di Provinsi Yogyakarta.	Buku Pradiplomasi ini diterbitkan pada tahun 2013	Kajian pada buku Paradiplomasi ini difokuskan kepada pembahasan 4 aspek, aspek teoritis hubungan internasional, aspek diplomasi, dan dari aspek praktis pembuatan kerjasama internasional.

B. Fokus penyelesaian Hambatan-Hambatan dalam kerjasama *sister city* antara kota Bandung dengan kota Braunschweig.

Sister city yang telah berjalan 57 tahun antara Kota Bandung dengan Kota Braunschweig ini pada kenyatannya selalu menemui beberapa hambatan-Hambatan beberapa

hambatan telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, baik Kota Bandung maupun Kota Braunschweig memang memiliki beberapa program alternatif sebagai upaya untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi pada kerjasama *sister city* ini, diantaranya adalah:

1. Dari Pihak Bandung

Pada pertemuan di Bulan Februari 2016 agenda ini sebenarnya di inisiasi oleh Konsulat Jendral Hamburg Silvy Arifin sebagai upaya Merevitalisasi kerjasama *sister city* antara Bandung dan Braunschweig yang telah disepakati melalui ikatan persahabatan Bandung-Braunschweig pada tanggal 24 Mei 1960. Konsulat jendral RI Hamburg menyampaikan peningkatan kerjasama yang konkrit antara kedua kota kembar merupakan momentum yang baik mengingat kedua kota memiliki karakter yang saling melengkapi.

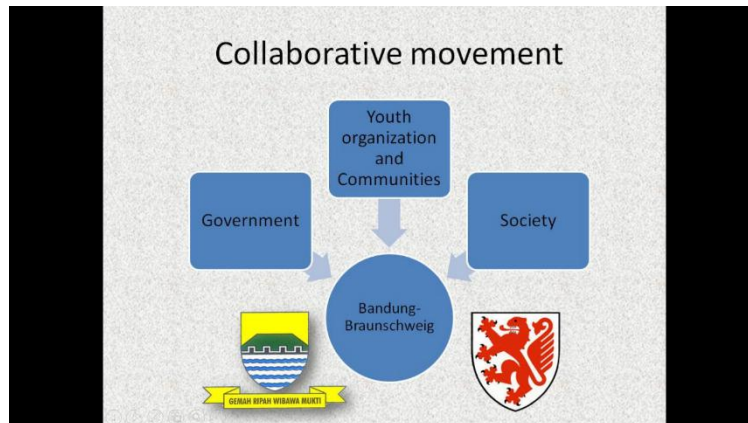
Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kerjasama *sister city*, Kota Bandung dan Kota Braunschweig maka di adakan penandatanganan *Minutes Of Meeting* (MoM) dan ini akan menjadi landasan baru bagi keberlangsungan kerjasama *sister city* Bandung-Braunschweig, ada 3(Tiga) Poin utama dalam landasan baru ini yaitu:

- 1) Ekonomi
- 2) Pengembangan Kota
- 3) Sosial Budaya dan Kepemudaan

Upaya lainnya dalam menghidupkan kembali kerjasama ini adalah dengan dilibatkannya beberapa komunitas dalam kerjasama *sister city* ini, salah satunya adalah Bandung *Deutsch Club* Komunitas pencinta Jerman ini yang nantinya akan menjadi perantara antara Bandung dan Braunschweig mengingat dan menjadi alternatif dalam pelaksanaan program kerjasama *sister city* Bandung-Braunschweig kedepannya. Ketua *Bandung Deutsch Club* menyampaikan bahwa landasan pembentukan kelompok pecinta Jerman tersebut adalah untuk mendorong pemuda Bandung Agar tertarik belajar Bahasa Jerman melalui pendekatan yang informal dan kreatif, diantaranya dengan menggunakan metode permainan. Selain itu Teguh menyampaikan tentang konsep yang di ajukan oleh *Deutsch Club* sebagai langkah konkrit dari pemuda untuk kemajuan atau keharmonisan *sister city* Bandung-Braunschweig. Konsepnya itu adalah pergerakan kolaborasi antara Pemerintah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat. Agar hubungan kerjasama ini hanya bertemu di sektor pemerintahan saja, karena menurut Teguh, jika suatu hubungan *sister city* selalu berpatokan kepada pemerintah, pasti akan terbentur dengan yang namanya anggaran, dan *political will* dari masing-masing pemerintah itu sendiri. Tetapi Teguh berpendapat bahwa jika ada kolaborasi seperti ini

meskipun dari pemerintah tidak ada program, namun jika Organisasi Kepemudaan dan Masyarakatnya punya kontak maka program-program ini masih tetap bisa jalan. Berikut gamabran konsep yang ditawarkan oleh *Deutsch Club* Bandung.

Gambar 4.3
Konsep Kolaborasi



Sumber: Presentasi Untuk Konsolidasi antara *Deutsch Club* dengan Pemerintah Kota Bandung

Hal senada juga di ungkapkan oleh Kepala Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Bandung Dr. Muhammad Anwar M.Si. yang mengungkapkan bahwa untuk menyelesaikan beberapa hambatan yang terjadi dalam *sister city* kota Bandung dan Kota Braunschweig, Pemerintah tidak bisa untuk meghadapi sendiri masalah ini, sehingga nanti kedepannya harus ada Kolaborasi antara Pemerintah sebagai pemangku keputusan, Komunitas dan Masyarakat Bandung itu sendiri sebagai pelaksana dari program-program yang ada pada *sister city* antar Bandung dan Braunschweig ini.

2. Dari pihak Braunschweig

Braunschweig sebagai mitra Kota Bandung juga memiliki solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sering kali terjadi dalam hubungan kerjasama *sister city* ini, meskipun sejujurnya dalam hal ini tidak terlalu banyak hambatan yang dihadapi secara internal oleh pihak Braunschweig, namun Braunschweig sebagai mitra Kota Bandung ingin membantu menyelesaikan atau menghadapi hambatan-habatan yang ada secara bersama-sama.

Ada beberapa rencana tentang program-program akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Braunschweig di tahun 2017 ini, salah satunya adalah menurut Elke Gerlach mereka akan mengadakan suatu konser music hip-hip di Kota Braunschweig, yang di dalamnya juga akan ada seminar dan acara besar, dan menurut Elke Pemerintah kota Braunschweig akan juga mengundang pemerintah Kota Bandung untuk datang di acara tersebut.

Untuk memudahkan komunikasi, Pemerintah Braunschweig bekerjasama dengan salah satu warga indoneisa yang ada di Braunschweig sebagai perantara antar mereka dengan pemerintah Bandung, dan juga menjadikan *Deutsch Club* Bandung sebagai parner dalam bidang kerjasama kepemudaan, di bulan Mei 2017, Pemerintah Kota Braunschweig dan *Deutsch Club* Bandung juga akan mengadakan perayaan 58 Tahun kerjasama *sister city* Bandung-Braunschweig di Kota Bandung, dengan konsep yang berbeda, *Deutsch Club* yakin acara ini akan meriah dan tujuan mereka akan tersampaikan, yaitu mengenalkan *sister city* kepada masyarakat kota Bandung yang lebih luas.

Kesimpulan

Dalam hal ini, Kota Bandung menggunakan konsep paradiplomasi yaitu dengan skema Global paradiplomasi yaitu kerjasama yang dilakukan oleh sub-nation di sebuah Negara dengan sub-nation di Negara lain. Kota Bandung disini sebagai aktor sub-national itu sendiri dengan melakukan kerjasama *sister city* dengan Braunschweig yang juga sub-nasional dari Negara Jerman.

Untuk membentuk sebuah kerjasama dengan skema *sister city*, sebenarnya Bandung memiliki kesempatan atau memiliki kapasitas lebih untuk membentuk skema tersebut bersama dengan kota yang memiliki kualitas lebih di banding Braunschweig, tetapi pada akhirnya Bandung tetap memilih kota Braunschweig sebagai partner kerjasama *sister city*, memang hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, selian faktor adanya kesamaan karakteristik antara kedua kota ini dan adanya kepedulian bersama terhadap kelangsungan kerjasama ini ada juga faktor sebagai berikut:

1. Adanya Kesamaan Karakteristik antara kedua kota Kembar ini terutama dalam bidang, Wisata, Budaya dan Pendidikan dan
2. Adanya usaha kedua belah pihak untuk mencapai tujuan berdasarkan perbedaan geografi, budaya, agama, bahasa, politik, dan faktor-faktor lain yang berbeda dengan daerah lain di negara mana sub aktor itu berada. Serta pada dasarnya bawa meskipun persepsi ini terkait dengan segmentasi objek tetapi lebih didorong oleh faktor politik juga.

Kemudian pada teori ke dua pengambilan keputusan, disini penulis melihat adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dikatakan sebagai input, dalam hal ini adalah ketika walikota Braunschweig mengusulkan kepada konsulat jendral Indonesia di

Jerman yang mengungkapkan keinginan untuk mengunjungi Kota Bandung, yang kemudian ditanggapi oleh Konsulat Jendral disana dengan mengirimkan surat kepada Koa Bandung, dan mengupayakan terwujudnya pertemuan ini, yang mana pada akhirnya perwakilan dari walikota Braunschweig datang ke Kota Bandung pada 16 Februari 2016, dalam kunjungan ini kemudian pemerintah Bandung dalam hal ini diwakilkan oleh wakil walikota Bandung bersama perwakilan dari Braunschweig Anehret Ihbe mendatangi beberapa fasilitas milik pemerintah kota Bandung yang salahsatunya adalah mengunjungi PDAM Tirtawening untuk melihat fasilitas pengelolaan limbah. Dalam hal ini penulis melihat proses ini semua merupakan sebuah masukan atau Input yang kemudian harus di proses untuk dijadikan sebuah output.

Setelah pertemuan tersebut kemudian ada proses yang terjadi di internal Pemerintah Kota Bandung melalui Bidang kerjasama daerah yang dalam hal ini adalah Sub bagian umum pemerintah kota Bandung mengkonsolidasikan kepada pihak-pihak terkait seperti komunitas pemuda, PDAM, dan di internal pemerintah Kota Bandung tentang maksud dan tujuan yang disampaikan pihak Kota Braunschweig.

Setelah proses tersebut, kemudian pada tanggal 17 Februari 2016 terbitlah *Minute of Meeting* yang didalamnya terdapat poin-poin tentang komitmen bersama untuk mempererat kerjasama *sister city* antar lain di bidang Ekonomi, Pengembangan Kota, Sosial, dan Pertukaran Pemuda. Hal ini merupakan output dari kumpulan beberapa input yang kemudian di proses menjadi output ini.

Maka dari itu kota bisa mengambil kesimpulan bahwa kenapa Kota Bandung akhirnya memilih melanjutkan kerjasama dengan Kota Braunschweig adalah karena, pertama ada kesamaan karakteristik antara Bandung dan Braunschweig, terutama pada Bidang Pendidikan, Wisata, Budaya. Kedua Adanya manfaat – manfaat yang didapat Kota Bandung Dalam Kerjasama *sister city* ini, diantaranya adalah memudahkan kerjasama antar universitas yang ada di Bandung dan Braunschweig, serta dalam hal pengelolaan limbah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - BUKU

- Amal. Ichlasul, *Regional and Central Government in Indonesian Politics West Sumatra and South Sulawesi 1945 – 1979*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992
- Amor Patria, Teguh, “Telusur Bandung”, Elex Media Komputindo, Indonesia, 2014
- Bandung, Badan Pusat Statistik Kota, “*Kota Bandung Dalam Angka 2003-2012*”, p.6.
- Caroline Purnawan, Ifa Safira Mustikadara, "Kampanye Sister City Bandung Braunschweig Untuk Membuka Peluang Kerjasama Kreatif antar Kedua Kota." *Journal Tingkat Sarjana Bidang Senirupa dan Design*, 2010: 4.
- Djiwandono, Soedjati, “Hubungan Internasional Dalam Era Globalisasi”, 1997.
- Holsti, K.J. 2004. *Taming the Sovereigns Institutional Change in International Politics*. United Kingdom : Cambridge University Press.
- Jatmika, Sidik. Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001
- Keating, Francisco Aldecoa and Michael. *Paradiplomacy in Action*. New York: Frank Cass and Co. Ltd., 2013.
- Morgenthau, Hans J, *Politics among Nations: the Struggle for Power and Peace*, 3rd ed., Alfred A. Knopf, New York, 1961.
- Mukti, Takdir Ali. *PARADIPLOMACY, Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta, 2013.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Rosda.
- Robert O. Keohane, Joseph S Nye. *Power and Interdependence (3th Edition)*. New York: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2001.
- Soldatos, Panayotis, “*An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-policy Actors*”: dalam dalam Hans J. Michelman dan Panayotis Soldatos (ed),

Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units, Clarendon Press, Oxford, 1990.

Suhernan. *Psikologi Kognitif*. Srikandi, 2005.

Taylor, Phillip, *Non-State Actors in International Politics from Transregional to Substate Organizations*, Westview Press, Boulder, 1984.

Tomordy, M. (2010). *Smart Cities Transforming The 21st Century City Via The Creative Use Of Technology*, London, Hong Kong, San Francisco, Sydney, Arup.

Watson, sebagaimana dikutip oleh Robert Jackson dan Georg Sorenson dalam, *'Introduction to International Relations'*, Oxford University Press Inc., New York, 1999. Dalam edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Dadan Suryadipura, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2009

B. JOURNAL

Journal of International Affairs, Bologna Center

E-Jurnal Universitas Al-Ghifhari, Juhaeni, Jojo. Perbandingan tata kelola pemerintahan antar kota linas Negara (*sister city*) di pemerintahan kota Bandung,

E-Jurnal Univesitas Diponegoro, Sariffudin.S, "*Peluang Pengembangan Smart City Untuk Mewujudkan Kota Tangguh di Kota Semarang*", Semarang, Indonesia, 2015

Journal of International Affairs, Wolf, Stefan. "Paradiplomacy." 2014: 10.

C. PERATURAN PEMERINTAH

Bandung, *Peraturan Daerah Kota Bandung*, No 12 tahun 2010 tentang kerjasama daerah BAB II pasal 2, Prinsip

Sekretariat Jenderal MPR RI, Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 *perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (Sister City) dan Antar Provinsi (Sister Province) dalam dan luar negeri.*

D. WEBSITE

[http.artikata.com/arti-14767-bandung.html](http://artikata.com/arti-14767-bandung.html) , Admin, sys, “Kota Bandung”, tersedia dari (diakses pada 19 September 2016)

<http://bandung.go.id/rwd/index.php?fa=pemerintah.detail&id=326> “Sejarah Kota Bandung”, (diakses pada 19 September 2016)

<http://bandung.go.id/rwd/index.php?fa=berita.detail&id=660> Sister city Braunschweig”, tersedia di, diakses pada tanggal 19 September 2016, 19.00 WIB

<http://Bandung.go.id/rwd/index.php?fa=pemerintah.detail=326>. n.d. Admin, sys, ‘pemerintah kota Bandung’, (dipublish pada 1 november 2005) (diakses pada 15 maret 2016).

<http://www.theory-talks.org/2008/05/theory-talk-7.html>. Theory Talks is an initiative by Peer Schouten and is registered as ISSN 2001-4732 | 2008-2012. Beberapa wawancara Theory Talks telah diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul “Theory Talks, Perbincangan Pakar Sedunia Tentang Teori Hubungan Internasional Abad Ke-21”, Editor: Bambang Wahyu Nugroho dan Hanafi Rais, PPSK dan LP3M UMY, Yogyakarta, 2012

<http://www.kemlu.go.id/hamburg/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Bandung-braunschweig2016.aspx> “Wakil walikota Bandung dan walikota Braunschweig berkomitmen mempererat kerjasama Sister City antara Bandung dan Braunschweig”, diakses pada 13 april 2016

<http://dictionary.reference.com/browse/diplomacy>, Arti kata Diplomasi, tersedia di diakses pada 20 November 2016, 07 .00 WIB.

<https://ppid.bandung.go.id/profil-kota-bandung> Profil Kota Bandung, di akses pada, 1 januari 2017.

<https://portal.bandung.go.id/posts/2005/08/01/QRI7/visi-dan-misi> Visi dan Misi Kota Bandung, Tersedia di diakses pada 01/04/2017, 08.00 WIB

http://www.braunschweig.de/english/city/about_braunschweig.html “About Braunschweig”, accessed on 1/4/2017, 07.00 WIB

http://www.braunschweig.de/english/city/welfen/startseite_welfenresidenz.html
Braunschweig, Die Lowenstadt, *Royal Heritage*. accessed on 1/4/2017. 07.00 WIB

http://www.braunschweig.de/english/city/welfen/startseite_welfenresidenz.html
“Braunschweig, Die Lowenstadt, *Royal Heritage*” accessed on 15/10/2014. 07.00
WIB

<http://www.sister-cities.org/mission-and-history> “Sister City, History”, accessed on 1/5/2017,
05.00 WIB.

<http://www.businessdictionary.com/definition/memorandum-of-understanding-MOU.html>
“The definition of MoU”, pada 1/5/2017, 09.00 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514689463d4b2/perbedaan-antara-perjanjian-dengan-mou> “The meaning of MoU”, diakses pada 1/5/2017, 09.00 WIB

http://kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike. “The history of Sister City
Bandung and Braunschweig”, diakses pada 1/6/2017, 09.00 WIB

<http://www.kjihamburg.de/id/berita/kegiatan-kjri/175-tahun-emas-hubungan-kota-bandung-dan-braunschweig.html> “Relationship Bandung and Braunschweig, Golden years”.
diakses pada 1/6/2017, 09.00 WIB

<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/12659kamil.pdf> “Smart City
Bandung, Ridwan Kamil”, diakses pada 31 Januari 2017, 2.26 WIB

http://www.kjihamburg.de/index.php?option=com_content&view=article&id=775:waste-water-management-dan-kepemudaan-menjadi-salah-satu-fokus-utama-kerjasama-sister-city-antara-bandung-dan-braunschweig&catid=42&Itemid=407&lang=id. “waste water
management dan kepemudann menjadi salah satu focus utama kerjasama sister city antara
Bandung dan Braunschweig” tersedia di Diakses pada 2//2017, pukul 111.18 WIB